

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan interpretasi maka diperoleh kesimpulan :

1. Variabel DAU tahun sebelumnya justru berkontribusi terhadap peningkatan ketimpangan pendapatan di kabupaten tertinggal, mengindikasikan bahwa alokasi dana ini belum sepenuhnya efektif dalam mendorong pemerataan pendapatan pada periode penelitian.
2. Variabel DAK tahun sebelumnya terbukti mampu menekan ketimpangan pendapatan di kabupaten tertinggal, menunjukkan bahwa transfer fiskal ini efektif dalam mendorong pemerataan pendapatan pada periode 2017-2023.
3. Variabel Dana Desa tahun sebelumnya terbukti mampu menekan ketimpangan pendapatan di kabupaten tertinggal, yang mengindikasikan bahwa Dana Desa yang dikelola langsung oleh pemerintah desa efektif dalam mendorong pemerataan pendapatan masyarakat desa.
4. Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) turut mendorong peningkatan ketimpangan pendapatan di kabupaten tertinggal, yang mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia pada tahap awal pembangunan belum diikuti oleh pemerataan akses dan manfaat ekonomi antar kelompok masyarakat.
5. Variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbukti mampu menekan ketimpangan pendapatan di kabupaten tertinggal pada taraf 10% namun tidak signifikan pada taraf 5%. Temuan ini menunjukkan bahwa PDRB memiliki kecenderungan untuk menurunkan ketimpangan pendapatan di daerah tertinggal, namun pengaruhnya belum cukup kuat secara statistik pada tingkat kepercayaan yang lebih ketat (5%). yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah secara bertahap mulai dirasakan manfaatnya oleh berbagai lapisan masyarakat di daerah tertinggal.

5.2 Saran

Mengacu pada hasil temuan, adapun beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

1. Mengingat DAU terbukti meningkatkan ketimpangan pendapatan di daerah tertinggal, pemerintah pusat perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penggunaan DAU di kabupaten tertinggal. Pengawasan yang lebih ketat perlu diterapkan agar DAU tidak hanya terserap pada belanja rutin seperti gaji pegawai, melainkan diarahkan pada belanja modal produktif yang menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Selain itu, penguatan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu didorong agar ketergantungan terhadap transfer DAU dapat dikurangi secara bertahap.
2. Mengingat DAK dan Dana Desa terbukti mampu menurunkan ketimpangan pendapatan di daerah tertinggal, pemerintah pusat perlu mempertahankan dan meningkatkan alokasi kedua instrumen fiskal ini. Untuk DAK, peningkatan alokasi di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur perlu disertai dengan penargetan yang lebih tepat sasaran agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata. Untuk Dana Desa, penguatan kapasitas pemerintah desa melalui pelatihan aparatur desa, pendampingan intensif, serta peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana perlu terus ditingkatkan agar Dana Desa dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan produktif yang berdampak langsung pada pemerataan pendapatan masyarakat desa.
3. Mengingat PDRB cenderung mampu menurunkan ketimpangan pendapatan di daerah tertinggal (meskipun belum signifikan secara statistik pada taraf 5%), upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi perlu terus didorong dan diperluas jangkauannya. Pemerataan akses pendidikan, kesehatan, keterampilan, dan kesempatan kerja perlu diprioritaskan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok yang paling rentan di daerah tertinggal. Namun demikian, mengingat IPM justru ditemukan meningkatkan ketimpangan pendapatan secara signifikan, peningkatan IPM harus diimbangi dengan kebijakan distribusi yang lebih

merata, seperti perluasan akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat berpendapatan rendah, serta program pemberdayaan ekonomi lokal, agar manfaat pembangunan manusia tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Pertumbuhan ekonomi daerah juga perlu diarahkan pada sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja lokal seperti pertanian, perikanan, dan perdagangan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat berpendapatan rendah.

4. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi ketimpangan pendapatan di daerah tertinggal seperti tingkat kemiskinan, belanja modal daerah, akses infrastruktur, dan tingkat pengangguran. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas periode penelitian, menambah jumlah sampel, atau menggunakan metode estimasi yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif.

